

ABSTRAK

Zahra Nanda Awalia Nurman, 1228010226: “REFORMASI BIROKRASI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Permasalahan yang diangkat adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), khususnya dalam aspek perubahan nilai-nilai dasar aparatur serta peningkatan kompetensi aparatur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi menuju WBK/WBBM di BRMP, serta menilai efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori reformasi birokrasi Mustopadidjaja (dalam Amir et al., 2019) yang menekankan penguatan integritas dan profesionalitas aparatur melalui perubahan nilai-nilai dasar, penataan organisasi dan mekanisme kerja, penguatan sistem manajemen pemerintahan, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kasubbag Tata Usaha, staf kepegawaian, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BRMP telah berjalan cukup baik dalam aspek penataan organisasi dan mekanisme kerja, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek perubahan nilai-nilai dasar dan peningkatan kompetensi aparatur. Secara keseluruhan, reformasi birokrasi di BRMP menunjukkan kemajuan yang positif, namun memerlukan penguatan pembinaan integritas dan peningkatan pelatihan kompetensi bagi seluruh pegawai guna mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berintegritas.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas Korupsi, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Zahra Nanda Awalia Nurman, 1228010226: “Bureaucratic Reform Toward a Corruption-Free Zone and a Clean and Serving Bureaucratic Zone at the Agricultural Assembly and Modernization.”

This research is motivated by the importance of bureaucratic reform in realizing clean, effective, and integrity-driven governance toward the achievement of Corruption-Free Zones (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Zones (WBBM). The problem addressed in this research is the suboptimal implementation of bureaucratic reform at the Agency for Agricultural Assembly and Modernization (BRMP), particularly in terms of transforming core bureaucratic values and improving the competence of civil servants.

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of bureaucratic reform toward WBK/WBBM at BRMP, as well as to assess its effectiveness and the obstacles encountered in achieving high-quality public service-oriented governance. The theoretical framework of this research is based on Mustopadidjaja's theory of bureaucratic reform (in Amir, 2019), which emphasizes strengthening the integrity and professionalism of civil servants through the transformation of core values, organizational restructuring and work mechanisms, strengthening government management systems, and enhancing employee competence.

This study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation studies. The research informants include the Head of Administration Subdivision, staffing personnel, and members of the public as service users. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of bureaucratic reform at BRMP has progressed fairly well in terms of organizational structuring, work mechanisms, and strengthening of government management systems. However, challenges remain in transforming core bureaucratic values and improving employee competence. Overall, bureaucratic reform at BRMP shows positive progress, yet it requires stronger integrity development and enhanced competency training for all employees in order to realize a professional, clean, and integrity-based bureaucracy.

Keywords: Bureaucratic Reform, Corruption-Free Zone, Public Service.